

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) INSPEKTORAT KOTA TEBING TINGGI TAHUN ANGGARAN 2022



INSPEKTORAT KOTA TEBING TINGGI

Jln. Gunung Agung No. 4, Tj. Marulak, Kec. Rambutan,
Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara
Email : itkotebingtinggi@gmail.com
Website : inspektorat.tebingtinggikota.go.id
Kode POS : 20614

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT KOTA TEBING TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Inspektorat Kota Tebing Tinggi untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Inspektorat Kota Tebing Tinggi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Tebing Tinggi, Februari 2023

INSPEKTUR KOTA TEBING TINGGI



**H. KAMLAN, S.H., M.M., CGCAE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650603 198602 1 004**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan. LKjIP merupakan suatu bagian dari pelaksanaan manajemen kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 disusun sesuai dengan kaidah dan sistematika sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui LKjIP, diharapkan akan didapatkan gambaran mengenai prinsip-prinsip “*good governance*” dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di Instansi Pemerintah.

Demikian LKjIP Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 ini disusun, semoga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana mestinya.

Tebing Tinggi, Januari 2023

INSPEKTUR KOTA TEBING TINGGI



H. KAMLAN, S.H., M.M., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19650603 198602 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGATAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	2
1.3 Aspek Strategis serta Permasalahan Utama.....	4
1.4 Landasan Hukum.....	5
1.5 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1 Rencana Strategis	7
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah	7
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat.....	7
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2022	9
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
3.1 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2022	14
3.1.1 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	20
3.2 Realisasi Anggaran.....	31
3.3 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	32
3.4 Inovasi	34
BAB IV PENUTUP	35
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi SAKIP.

Hal ini merupakan target dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 diharapkan dapat :

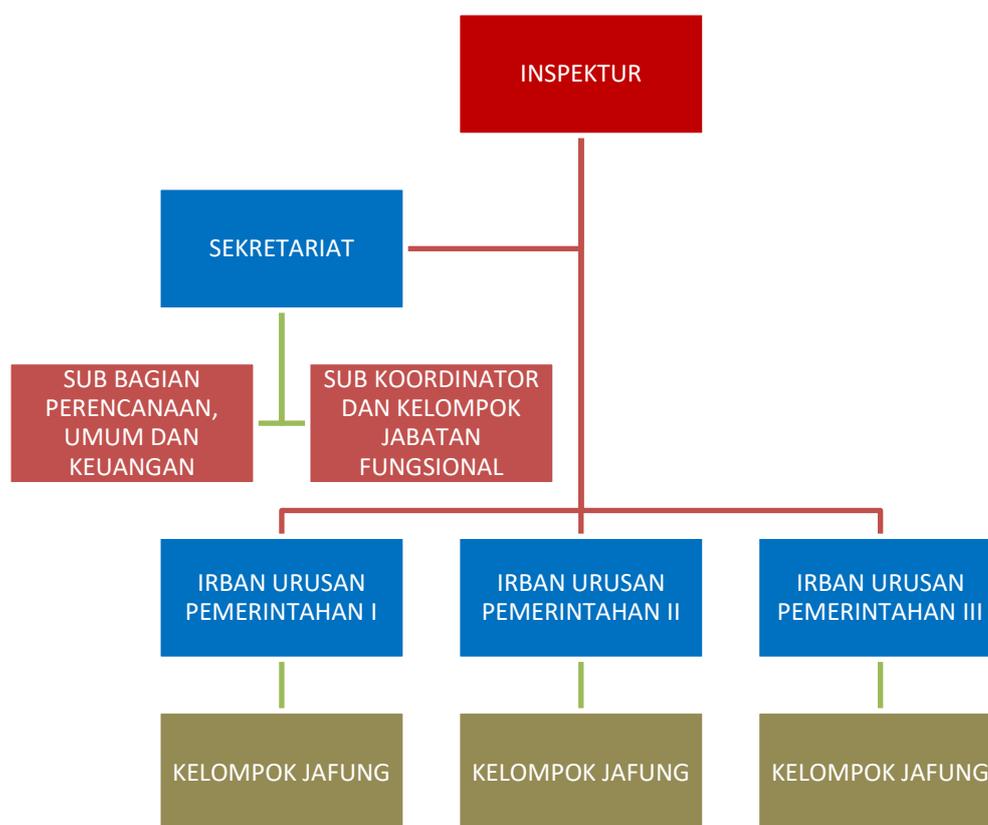
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Inspektorat Kota Tebing Tinggi;
2. Mendorong Inspektorat Kota Tebing Tinggi didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Inspektorat Kota Tebing Tinggi untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Inspektorat Kota Tebing Tinggi di dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Inspektorat Kota Tebing Tinggi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi No. 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi No. 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi, Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi dan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Inspektorat Kota Tebing Tinggi.

Sebagai satuan kerja Pengawasan Internal Pemerintah, Inspektorat Kota Tebing Tinggi mempunyai tugas yaitu melakukan pengawasan/pemeriksaan sesuai dengan aturan dan standar profesi yang berlaku bagi Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP), oleh karena pengawasan bagian dari manajemen dan memegang peranan yang sangat penting dalam proses Pemerintahan, terutama dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

Inspektorat Kota Tebing Tinggi merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :



Bagan 1.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat

Berdasarkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Inspektorat Kota Tebing Tinggi, Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan secara teknis Administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan kelurahan. Inspektorat melaksanakan tugas tersebut, menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat;
- d) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e) Pelaksanaan kordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f) Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi
- g) Pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah; dan
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kota Tebing Tinggi didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan perkembangan sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan, Jenis Kelamin, Golongan dan Pendidikan pada Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun 2022

Pegawai	Jenis Kelamin		Gol									Pendidikan				
	Lk	Pr	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	SMA	D1	D3	S1	S2
Pejabat Struktural	3	3	-	-	-	-	-	1	1	3	1	-	-	-	1	5
JFT	14	18	-	-	14	6	3	2	5	2		-	-	-	26	6
JFU	7	2	1	-	1	-	2	3	3	-	-	2	-	1	5	2
Tenaga Honorer	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-

Sumber data: Subbag Perencanaan, Umum dan Keuangan Itko Tebing Tinggi Tahun 2022

1.3 Aspek Strategis serta Permasalahan Utama

Peran Inspektorat pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi adalah dalam hal pengawasan. Inspektorat Kota Tebing Tinggi mempunyai tugas membantu Walikota dalam melakukan pembinaan, pemeriksaan, revidu, evaluasi, Monitoring dan konsultasi pada penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Bukan hanya itu, pada tahun 2017 dengan adanya MoU antara Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH), peran Inspektorat sekarang menjadi menjadi lebih strategis dalam mendeteksi penyelewengan dan menentukan jenis pelanggaran yang terjadi pada penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Untuk melakukan pengawasan yang efektif dan efisien, maka diperlukan kesiapan bukan hanya dari Inspektorat Kota Tebing Tinggi, akan tetapi juga dari setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk lebih berakuntabilitas menuju perubahan ke arah perbaikan yang lebih baik.

Bila dikaitkan dengan visi dan misi serta program yang telah dimuat dalam Renstra Inspektorat Kota Tebing Tinggi dan RPJMD Kota Tebing Tinggi 2017-2022, maka Inspektorat Kota Tebing Tinggi dalam bidang pengawasan (*control*), dituntut untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan sasaran sistem pemerintahan yang akuntabel, transparan dan taat hukum. Hal ini tertuang dalam Renstra Inspektorat Kota Tebing Tinggi yang menuntut kesiapan secara dini guna melakukan perubahan ke arah perbaikan yang lebih signifikan, efektif dan efisien agar mampu memberi pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Tebing Tinggi dilakukan setelah mencermati dengan seksama berbagai kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) yang ada, bahkan hal-hal yang mungkin akan timbul.

Pada tahun ini, Inspektorat menghadapi beberapa tantangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, beberapa di antaranya :

1. Paradigma stakeholder terhadap pengawasan belum berubah.
Inspektorat perlu mengubah paradigma stakeholder dari yang sifatnya sebagai pencari kesalahan saja menjadi rekan kerja yang juga berperan sebagai konsultan dan catalist.
2. Kompetensi Aparatur belum optimal.
Banyaknya jenis tugas pengawasan memerlukan kompetensi yang sesuai. Kapasitas Aparatur harus lebih dioptimalkan untuk kelancaran tugas pengawasan.
3. Kurang optimalnya melakukan pemeriksaan fisik di lapangan

Inspektorat dalam melakukan pemeriksaan fisik di lapangan masih kurang optimal disebabkan masih minimnya alat bantu pemeriksaan.

1.4 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi SAKIP;
6. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Inspektorat Kota Tebing Tinggi;
7. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi.

1.5 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Inspektorat Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja
- 1.3 Aspek Strategis serta Permasalahan Utama
- 1.4 Landasan Hukum
- 1.5 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 1.1 Rencana Strategis
 - 1.1.1 Visi Kepala Daerah

1.1.2 Misi Kepala Daerah

1.1.3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

1.2 Rencana Kinerja Tahun 2022

1.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.2 Realisasi Anggaran

3.3 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Perencanaan Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Tujuan, Sasaran dan Program yang realistis dan rencana masa depan yang diinginkan dan dicapai.

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Pada RPJMD 2017 - 2022, sesuai dengan walikota terpilih dan dilantik pada bulan Mei 2017 maka Pemerintah Kota Tebing Tinggi merumuskan visi pembangunan Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 8 Tahun 2017 yaitu ***“Menjadikan Kota Tebing Tinggi Sebagai Kota Jasa dan Perdagangan yang Cerdas, Layak, Mandiri dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Beriman dan Berkualitas”***.

Untuk melaksanakan visi tersebut, maka misi yang akan dilaksanakan adalah:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
2. Mewujudkan Tebing Tinggi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah dan Perdagangan
3. Mewujudkan Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa
4. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Perkotaan

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan visi dan misi Walikota Tebing Tinggi maka Inspektorat Kota Tebing Tinggi memiliki tugas dalam mewujudkan misi pertama dari RPJMD Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022 yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik** dengan tujuan **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Didukung oleh Sumber Daya Manusia Yang Beriman Dan Berkualitas** dan sasaran **Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Akuntabel, Transparan dan Taat Hukum**.

Adapun indikator sasaran dalam mewujudkan misi tersebut telah dijabarkan didalam Renstra Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022 dan telah mengalami beberapa kali perubahan yang tertuang di dalam surat Keputusan

Inspektur Kota Tebing Tinggi Nomor 050/25 Tahun 2021 tentang Penetapan Suplemen Rencana Strategis Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun 2021-2022.

Berdasarkan hal tersebut berikut kami sajikan Tabel 2.1 yang berisi Tujuan, Sasaran dan Indikator Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun 2019-2022 :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Berdasarkan Suplemen Renstra Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun 2021-2022

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN			
				2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih	1. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	85%	92%	94%	96%
			2. Persentase temuan yang bebas dari penyimpangan keuangan dan aset material	55%	65%	98,50%	98%
				60%	65%		
3. Persentase Penyelesaian Kasus Pengaduan	N/A	98%	99%	98%			
2.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel	1. Level Maturitas SPIP	3	3	3	3
			2. Presentase SKPD dengan nilai AKIP minimal B	45%	60%	70%	80%
			3. Level Kapabilitas APIP	N/A	3	3	3

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2022

Tujuan utama Inspektorat Kota Tebing Tinggi yang hendak dicapai pada tahun 2022 adalah “Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel” sesuai dengan tujuan Inspektorat Kota Tebing Tinggi pada Suplemen Renstra Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun 2021, maka sasaran dalam Rencana Kerja (Renja) yang ditargetkan dicapai pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih;
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel;

Tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam Suplemen Renstra Inspektorat Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kota Tebing Tinggi

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih	1. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	Persen	96%
			2. Persentase temuan yang bebas dari penyimpangan keuangan dan aset material	Persen	98,70%
			3. Persentase Penyelesaian Kasus Pengaduan	Persen	100%
2.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel	1. Level Maturitas SPIP	Level	3
			2. Presentase SKPD dengan nilai AKIP minimal B	Persen	80%
			3. Level Kapabilitas APIP	Level	3

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup

outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Eselon II, maka Inspektorat Kota Tebing Tinggi telah memiliki Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp 8.874.123.200 yang digunakan untuk 3 (tiga) program, yaitu:

1. Program penyelenggaraan pengawasan;
2. Program Perumusan, Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;
3. Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, Renja, IKU dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Inspektur Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Inspektur Kota Tebing Tinggi Tahun 2022

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Bersih	Persentase Temuan yang Ditindaklanjuti	Persen	94%
		Persentase Temuan yang Bebas dari penyimpangan keuangan dan aset material	Persen	98%
		Persentase Penyelesaian Kasus Pengaduan	Persen	98%
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Akuntabel	Level Maturitas SPIP	Level	3
		Persentase OPD dengan Nilai AKIP Minimal B	Persen	80%
		Level Kapabilitas APIP	Level	3

Tabel 2.4
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun 2022

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah	Persentase Kegiatan Penunjang yang terlaksana	95 %	6.932.269.500
	a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	12 Laporan	9.994.000
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah bulan penyelesaian laporan	12 bulan	9.994.000

	b. Administrasi Perangkat Daerah	Keuangan	Jumlah laporan administrasi keuangan	12 Laporan	5.207.250.000
	- Penyedia gaji dan tunjangan ASN		Jumlah Bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	5.207.250.000
	c. Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah		Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah yang dihasilkan	12 Laporan	21.174.800
	- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah bulan penyediaan pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 bulan	21.174.800
	d. Administrasi Perangkat Daerah	Kepegawaian	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dihasilkan	12 Laporan	343.960.000
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah bulan ketersediaan untuk pendidikan dan pelatihan	12 bulan	343.960.000
	e. Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan administrasi Umum Perangkat Daerah yang dihasilkan	12 Dokumen	691.818.100
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah bulan ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	15.125.100
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	23.151.500
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	127.804.000
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 bulan	81.237.500
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah bulan penyediaan dana untuk rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	444.500.000
	f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	10 Jenis	173.979.000
	- Pengadaan Mebel		Jumlah bulan pengadaan Mebel	12 bulan	94.196.000
	- Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya		Jumlah bulan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	12 bulan	79.783.000

	g. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	12 dokumen	198.279.600
	- Penyedia Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	2.750.000
	- Penyedia Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	99.073.600
	- Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	96.456.000
	h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik Daerah yang dilaksanakan	12 Laporan	285.814.000
	- Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan untuk kendaraan dinas	12 bulan	144.830.000
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 bulan	47.960.000
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya	12 bulan	93.024.000
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Hasil Pengawasan internal yang ditindaklanjuti	97 %	1.803.521.700
	a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Internal yang dihasilkan	93 Laporan	1.229.012.000
	- Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengawasan kinerja	10 Laporan	180.000.000
	- Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengawasan keuangan	29 Laporan	510.000.000
	- Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu atas laporan kinerja	32 Laporan	72.000.000
	- Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu atas laporan keuangan	15 Laporan	180.000.000
	- Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah laporan Kerjasama Pengawasan Internal dalam rangka implementasi SPIP	7 Laporan	121.240.000

	- Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	4 Laporan	165.772.000
	b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu yang dihasilkan	43 Laporan	574.509.700
	- Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan kegiatan Sidang TPTGR	3 Laporan	214.509.700
	- Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan pengawasan dengan tujuan tertentu	40 Laporan	360.000.000
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase hasil pembinaan internal yang dilaksanakan	97 %	138.332.000
	a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil perumusan Kebijakan Teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	1 Laporan	12.628.000
	- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah laporan perumusan fasilitasi pengawasan dalam rangka Kapabilitas APIP	1 Laporan	12.628.000
	b. Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi	5 Laporan	125.704.000
	- Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan	55.180.000
	- Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	2 Laporan	48.000.000
	- Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 Laporan	22.524.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2022

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tujuan organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Akuntabilitas kinerja tersebut dipertanggungjawabkan melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2022.

Skala nilai peringkat kinerja digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengukur kinerja organisasi, di mana hasil penilaian kinerja dimaksud lebih lanjut untuk mengidentifikasi kriteria penilaian realisasi kinerja, permasalahan yang menghambat peningkatan kinerja, memberikan solusi pemecahan Strategis tahun berikutnya sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun 2022

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Secara umum, Inspektorat Kota Tebing Tinggi telah memberikan kontribusi positif pada pencapaian Kinerja Organisasinya. Inspektorat Kota Tebing Tinggi memiliki 6 (Enam) Target pada Indikator Sasaran yang telah ditetapkan, dimana pada tahun 2022, keseluruhan target pada Indikator Sasaran terealisasi dan tercapai sesuai dengan target. Capaian Kinerja Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun 2022
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	KATEGORI	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih	1. Persentase tindak lanjut temuan	94%	95,76%	101,87%	Sangat tinggi	kasubbag evlap
		2. Persentase temuan yang bebas dari penyimpangan keuangan dan aset material	98%	100 %	102 %	Sangat tinggi	laporan hasil pengawasan
		3. Persentase penyelesaian kasus pengaduan	98%	100 %	102 %	Sangat tinggi	laporan hasil pengawasan
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel	1. Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100 %	Sangat tinggi	laporan hasil evaluasi dari BPKP
		2. Persentase SKPD dengan nilai AKIP minimal B	80%	100 %	125%	Sangat tinggi	laporan hasil pengawasan
		3. Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100 %	Sangat Tinggi	laporan hasil evaluasi dari BPKP

Sumber : Fungsional Analisis Kebijakan Muda

Tabel 3.2 menjelaskan bahwa Inspektorat Kota Tebing Tinggi memiliki 2 (dua) sasaran dan 6 (enam) indikator kinerja, seluruh indikator kinerja tersebut sudah tercapai sesuai dengan target.

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun 2021 dan Tahun 2022 Berdasarkan Perjanjian Kinerja 2021-2022

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2021			2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih	1. Persentase tindak lanjut temuan	94%	92,79 %	98,71 %	94%	95,76 %	101,87 %
		2. Persentase temuan yang bebas dari penyimpangan keuangan dan aset material	98,5%	100 %	102 %	98%	100%	102 %
		3. Persentase penyelesaian kasus pengaduan	99%	100 %	101 %	98%	100 %	102 %
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel	1. Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100 %	Level 3	Level 3	100 %
		2. Persentase SKPD dengan nilai AKIP minimal B	70%	100 %	142,9 %	80%	100 %	125 %
		3. Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100 %	Level 3	Level 3	100 %

Tabel 3.3 menjelaskan bahwa capaian kinerja Inspektorat Kota Tebing Tinggi yang terdiri dari 2 (dua) sasaran serta 6 (enam) indikator kinerja, pada tahun 2021, dari 6 (enam) indikator, terdapat 5 (lima) indikator yang tercapai sesuai dengan target dan satu indikator terealisasi dengan persentase capaian 98,71% sedangkan pada tahun 2022 seluruh indikator tercapai sesuai dengan target.

Adapun capaian sasaran startegis terhadap target akhir tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4
Capaian Sasaran Strategis Terhadap Target Suplemen Renstra Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun 2022

No	TUJUAN/SASARAN	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2022	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih	1. Persentase tindak lanjut temuan	101,87%	94%	108,37 %
		2. Persentase temuan yang bebas dari penyimpangan keuangan dan aset material	102 %	98%	104,08 %
		3. Persentase penyelesaian kasus pengaduan	102 %	92%	110,86 %
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel	1. Level Maturitas SPIP	3	3	100 %
		2. Persentase SKPD dengan nilai AKIP minimal B	125 %	80%	156,25 %
		3. Level Kapabilitas APIP	3	3	100 %

Tabel 3.4 menjelaskan bahwa Kemajuan Capaian Strategis 2022 terealisasi sesuai dengan target yang diharapkan dan ada beberapa sasaran indikator kinerja yang melebihi target akhir 2022.

Tabel 3.5
Analisis Target Indikator Kinerja Terhadap Capaian Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun 2022

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih	Persentase tindak lanjut temuan	94%	95,76%	101,87 %	Berhasil	Terus meningkatkan komunikasi dan evaluasi
		Persentase temuan yang bebas dari penyimpangan keuangan dan aset material	98%	100%	102 %	Berhasil	Menelaah dan menilai, memadai tidaknya dan penerapan sistem pengendalian manajemen, struktur pengendalian intern dan pengendalian

							opersional lainnya serta mengembangkan pengendalian yang efektif
		Persentase penyelesaian kasus pengaduan	98%	100 %	102 %	Berhasil	Terus meningkatkan komunikasi dan evaluasi
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100 %	Berhasil	Telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik
		Persentase SKPD dengan nilai AKIP minimal B	80%	100 %	125 %	Berhasil	Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
		Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100 %	Berhasil	Merumuskan rencana tindak yang lebih jelas dan terstruktur sehingga sumber daya dapat dialokasikan secara efisien dan lebih efektif guna mencapai target kapabilitas

Tabel 3.5 menyajikan data Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi yang telah dilakukan Inspektorat Kota Tebing Tinggi pada tahun 2022

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Pada Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun 2022

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Menunjang/ Tidak Menunjang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih	1. Persentase tindak lanjut temuan 2. Persentase temuan yang bebas dari penyimpangan keuangan dan aset material 3. Persentase penyelesaian kasus pengaduan	101,87 % 102 % 102 %	PROGRAM PENYELENGGARAN PENGAWASAN Penyelenggaraan Pengawasan Internal - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah - Reviu Laporan Kinerja - Reviu Laporan Keuangan - Kerjasama Pengawasan Internal - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah - Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	persentase hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti jumlah laporan hasil pengawasan internal Jumlah laporan pengawasan kinerja Jumlah laporan pengawasan keuangan Jumlah laporan hasil reviu atas laporan kinerja Jumlah laporan hasil reviu atas laporan keuangan Jumlah laporan Kerjasama Pengawasan Internal dalam rangka implementasi SPIP Jumlah laporan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu Jumlah laporan kegiatan Sidang TPTGR Jumlah laporan pengawasan dengan tujuan tertentu	menunjang Menunjang Menunjang Menunjang Menunjang Menunjang Menunjang Menunjang
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel	1. Level Maturitas SPIP 2. Persentase SKPD dengan nilai AKIP minimal B 3. Level Kapabilitas APIP	100 % 125% 100 %	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan Pendampingan dan Asistensi - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi - Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	persentase hasil pembinaan internal yang dilaksanakan Jumlah laporan hasil perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan Jumlah laporan perumusan fasilitasi pengawasan dalam rangka Kapabilitas APIP jumlah laporan hasil pelaksanaan pendampingan dan asistensi Jumlah laporan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Menunjang Menunjang Menunjang Menunjang Menunjang

Tabel 3.6 menjelaskan Analisa Keberhasilan dan Kegagalan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Inspektorat Kota Tebing Tinggi tahun 2022, program, kegiatan dan sub kegiatan menunjang terhadap tujuan/sasaran.

3.1.1 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Adapun Penjelasan dari Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis adalah sebagai berikut :

3.1.1.1 Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih

Sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih memiliki 3 (tiga) indikator, diantaranya :

a. Persentase Temuan yang Ditindaklanjuti.

Indikator ini digunakan untuk melihat capaian seluruh temuan APIP Eksternal dan Internal yang meliputi pemeriksaan BPK, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dan Inspektorat Kota Tebing Tinggi yang telah ditindaklanjuti **dengan status selesai** mulai dari tahun-tahun sebelumnya sampai dengan akhir tahun 2022.

➤ Realisasi Tahun 2022.

Pada Tahun 2022 indikator ini ditargetkan sebesar 94% dan terealisasi sebesar 95,76% dengan capaian sebesar 101,87% dengan data sebagai berikut:

Tabel 3.7
Target APIP Terhadap Jumlah Temuan yang di Tindak Lanjuti

No.	APIP	Jumlah Temuan	Rekomendasi	Status Tindak Lanjut		
				Selesai	Proses	Belum
1	BPK (2004-2022)	296	839	776	63	0
2	Inspektorat Provinsi (2005-2022)	154	186	186	0	0
	Jumlah	450	1025	962	63	0

sumber data: Fungsional Analisis Kebijakan

Tabel 3.7 diatas menjelaskan bahwa dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dari tahun 2004-2022, jumlah temuan yang telah ditindak lanjuti dengan Persentase 95.76% dan temuan dari Inspektorat Provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2022 yang telah ditindak lanjuti dengan Persentase 100%.

Capaian keberhasilan ini ditandai dengan penghargaan dari Inspektorat Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu Entitas terbaik dalam penyelesaian tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2022.

- Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya.
Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, indikator ini mengalami peningkatan sebesar 3,16% di mana pada tahun 2021 sesuai dengan tabel 3.3 mencapai angka 98,71%, dan capaian pada tahun 2022 mencapai angka 101,87 %.
- Perbandingan Realisasi dengan Target pada Akhir Renstra.
Apabila dibandingkan dengan target pada akhir Renstra sebesar 94%, maka Indikator Kinerja ini sudah tercapai sesuai dengan target.
- Analisis Keberhasilan/Kegagalan
Keberhasilan capaian tahun ini disebabkan karena beberapa hal antara lain:
 - Komitmen yang tinggi dari pimpinan untuk segera menindaklanjuti setiap temuan yang ada;
 - Komitmen ini dipertegas dengan melakukan “jemput bola” pada obrik terkait. Apabila ada temuan, maka Inspektorat melakukan Monitoring secara berkala ke obrik terkait agar segera menindaklanjuti hasil temuan yang ada;
 - Kemauan obrik dalam menindaklanjuti hasil temuan juga menjadi umpan balik yang penting dalam pencapaian indikator ini.

Adapun upaya yang dilakukan untuk dapat meningkatkan kinerja tersebut antara lain:

- Mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang ada untuk mencapai kinerja yang diharapkan;
- Melakukan ekspose terhadap temuan yang ada dan saran terhadap tindak lanjut temuannya;
- Meminimalisasi temuan berulang dengan sosialisasi peraturan-peraturan terbaru dan yang masih berlaku.

b. Persentase SKPD yang Bebas Penyimpangan Keuangan Aset dan Material

Indikator ini digunakan untuk melihat capaian Inspektorat Kota Tebing Tinggi dalam menekan penyimpangan aset keuangan dan material pada SKPD yang ada di Kota Tebing Tinggi. Yang dimaksud dengan penyimpangan keuangan aset dan material adalah temuan, keuangan dan aset daerah yang mencapai 5% dari anggaran SKPD yang bersangkutan. Dengan kinerja ini, diharapkan dari tahun ke tahun, penyimpangan keuangan aset dan material dapat diminimalisir atau berkurang.

Tabel 3.8
Persentase SKPD yang Bebas Penyimpangan Keuangan Aset dan Material

No	Nama SKPD	Anggaran (Rp)	Nomor LHP	Tanggal LHP	Jumlah Temuan	Nilai Temuan
1						
1	Kecamatan Padang Hulu	6.360.994.856	700.04/02/ITKO/2022	08 April 2022	2	Rp -
2	Kecamatan Rambutan	6.581.599.400	700.04/03/ITKO/2022	06 April 2022	3	Rp -
3	Kecamatan Bajenis	6.249.500.660	700.04/01/ITKO/2022	06 April 2022	3	Rp -
4	Kecamatan Padang Hilir	6.761.821.600	700.04/04/ITKO/2022	06 April 2022	3	Rp -
5	Kecamatan Tebing Tinggi Kota	6.435.127.443	700.04/05/ITKO/2022	06 April 2022	6	Rp -
6	Sekretariat Daerah	35.334.288.565	700.04/22/ITKO/2022	15 Agustus 2022	3	Rp -
7	Dinas Lingkungan Hidup	22.094.496.905	700.04/36/ITKO/2022	17 Oktober 2022	2	Rp -
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	5.396.816.009	700.04/08/ITKO/2022	8 Juni 2022	1	Rp -
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	4.562.665.023	700.04/12/ITKO/2022	5 Agustus 2022	2	Rp -
10	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	4.404.114.027	700.04/23/ITKO/2022	8 Agustus 2022	3	Rp -
11	Badan Kesatuan Bangsa	5.642.636.400	700.04/40/ITKO/2022	17 Oktober 2022	1	Rp 120.000
12	Dinas Perhubungan	7.954.446.400	700.04/37/ITKO/2022	21 Oktober 2022	1	Rp -
13	Sekretariat DPRD	25.344.300.529	700.04/27/ITKO/2022	15 Agustus 2022	1	Rp -
14	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian	3.933.915.154	700.04/06/ITKO/2022	8 JUNI 2022	3	Rp 1.321.759
15	Dinas Sosial	7.708.535.930	700.04/26/ITKO/2022	15 Agustus 2022	1	Rp -
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	13.710.376.903	700.04/23/ITKO/2022	22 Agustus 2022	2	Rp 500.000
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.838.910.091	700.04/10/ITKO/2022	09 JUNI 2022	1	Rp -
18	Satuan Polisi Pamong Praja	6.856.832.752	700.04/35/ITKO/2022	18 Oktober 2022	2	Rp 3.480.000
19	Badan Penanggulangan bencana Daerah	22.088.351.248	700.04/34/ITKO/2022	21 Oktober 2021	4	Rp 3.110.000
20	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8.153.732.489	700.04/39/ITKO/2022	21 Oktober 2022	4	Rp 3.600.000
21	PDAM Tirta Bulian		700.04/41/ITKO/2022	18 Oktober 2022	4	Rp -
22	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	10.295.027.858	700.04/38/ITKO/2022	18 Oktober 2022	2	Rp -
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.215.738.000	700.04/13/ITKO/2022	5 Agustus 2022	1	Rp -
24	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.917.092.024	700.04/09/ITKO/2022	10 JUNI 2022	3	Rp 513.362

25	Badan Kepedawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.541.530.300	700.04/11/ITKO/2022	09 Juni 2022	2	Rp	-
26	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	25.284.730.016	700.04/47/ITKO/2022	7 Desember 2022	3	Rp	-
27	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	175.768.360.444	700.04/43/ITKO/2022	7 Desember 2022	7	Rp	24.524.705
28	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	10.993.824.943	700.04/17/ITKO/2022	5 Agustus 2022	4	Rp	950.000
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	17.517.409.605	700.04/48/ITKO/2022	7 Desember 2022	5	Rp	-
30	Dinas Kesehatan	120.468.109.304	700.04/34/ITKO/2022	14 Desember 2021	4	Rp	-
31	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	86.467.928.601	700.04/42/ITKO/2022	13 Desember 2022	11	Rp	24.507.388
32	RSUD dr. H. Kumpulan Pane	59.291.314.289	700.04/46/ITKO/2022	05 Desember 2022	6	Rp	1.503.232
33	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5.361.479.208	700.04/07/ITKO/2022	8 Juni 2022	4	Rp	1.486.365
Jumlah					102	Rp	65.616.811

sumber data : Fungsional Analisis Kebijakan

➤ Realisasi Tahun 2022

Target pada Tahun 2022 adalah sebesar 98 % dan terealisasi sebesar 100%. Adapun temuan keuangan dan aset seluruh perangkat daerah tidak melebihi 5% dari anggaran yang ada. Dari realisasi ini Inspektorat Kota Tebing Tinggi mengembalikan keuangan daerah/negara sebesar Rp 65.616.811,-

➤ Perbandingan Realisasi dengan Tahun sebelumnya

Pada Tahun sebelumnya, Persentase SKPD bebas dari penyimpangan keuangan aset dan material sama dengan tahun ini.

➤ Perbandingan Realisasi dengan Target pada Akhir Renstra Pada Akhir Renstra, diharapkan seluruh perangkat daerah tetap menjaga tertib administrasi dan keuangan daerah. Hal ini menjadi tantangan kepada Inspektorat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang lebih baik.

➤ Analisis Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan dari indikator ini tidak terlepas dari peran tim yang ditugaskan dalam setiap audit, evaluasi dan reviu yang tertuang dalam PKPT Inspektorat Kota Tebing Tinggi.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai keberhasilan ini adalah:

- Melakukan pembimbingan pada saat pemeriksaan rutin dilaksanakan kepada Kepala SKPD terutama kepada Kepala SKPD, dan kepada Bendahara, Pengguna Barang, PPTK dan Pengurus Barang, sehingga

pencatatan yang dilakukan sesuai dengan apa yang dipertanggungjawabkan.

- Memberi kesempatan bagi perangkat daerah untuk memperbaiki setiap dokumen pertanggungjawaban.
- Membuka forum konsultasi/*coaching* bagi siapa saja (perangkat daerah) tentang pengelolaan keuangan dan pengadaan barang.

c. Persentase Penyelesaian Kasus Pengaduan

Indikator ini adalah untuk melihat capaian Inspektorat Kota Tebing Tinggi dalam menindaklanjuti seluruh pengaduan yang masuk baik dari masyarakat, lembaga, atau pemerintahan dengan harapan terciptanya *image* (citra) Pemerintah Kota Tebing Tinggi selalu aktif dan responsif terhadap pengaduan yang masuk.

➤ Realisasi Tahun 2022

Target sebesar 98% dan terealisasi sebesar 100% dengan data sebagai berikut:

- Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti : 45
- Jumlah seluruh kasus pengaduan yang masuk : 45
- Capaiannya sebesar 100%.

➤ Perbandingan Realisasi dengan Tahun sebelumnya

Pada tahun 2021 targetnya sebesar 98% dan terealisasi sebesar 100% dengan data sebagai berikut:

- Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti: 12
- Jumlah seluruh kasus pengaduan yang masuk: 12

Sedangkan pada tahun 2022 Target sebesar 98% dan terealisasi sebesar 100% dengan data sebagai berikut:

- Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti: 45
- Jumlah seluruh kasus pengaduan yang masuk: 45

➤ Perbandingan Realisasi dengan Target pada Akhir Renstra Realisasi tahun ini dengan target pada akhir Renstra persentasenya 100% maka kemungkinan besar hasil tersebut dapat dicapai.

➤ Analisis Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan dari indikator ini tidak terlepas dari peran anggaran keuangan sehingga banyak pengaduan yang masuk dan pengaduan tujuan tertentu.

3.1.1.2 Analisis Kegiatan Penunjang

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran ini adalah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah pada kegiatan antara lain:

- Monitoring Tindak Lanjut Hasil Temuan.
Tidak cukup hanya dengan ekspose, maka kegiatan Monitoring ini sangat penting dalam pencapaian indikator kinerja tersebut. Kegiatan ini melakukan “jemput bola” ke obrik terkait untuk segera menindaklanjuti hasil temuan pada obrik masing-masing. Kegiatan ini dilakukan 12 (dua belas) kali dalam setahun untuk melakukan monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dari BPK, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dan Inspektorat Kota Tebing Tinggi.
- Kegiatan Reviu Dokumen Perencanaan Penganggaran, dan dukungan dari kegiatan Pengawasan Internal secara Berkala dan Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah. Pada kegiatan-kegiatan ini diharapkan, pengawasan yang dilakukan dapat meminimalisir pelanggaran, yang membuat Laporan Keuangannya mendapat kewajaran saat direviu.
- Kegiatan Pengawasan Internal secara berkala, Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah. Setiap kegiatan diatas memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan SKPD mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporannya. Dalam hal pengawasan yang dimaksud, menjadi tugas Inspektorat juga dalam memberikan pembinaan dan *early warning* bagi SKPD dalam melaksanakan setiap tugas dan fungsinya, sehingga SKPD dapat memperbaiki secepatnya kesalahan yang ada.
- Kegiatan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, dimana kegiatan ini berisikan aktivitas penugasan atas tindak lanjut pengaduan masyarakat dan pemeriksaan khusus yang berasal dari pimpinan, APIP, dan APH.

3.1.1.3 Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel

Sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel memiliki 3 (tiga) indikator, diantaranya :

a. Level Maturitas SPIP.

Maturitas SPIP adalah Tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern, yang ditandai oleh eksistensi *control design* yang bersifat *hard control* dan *soft control*. Maturitas SPIP menunjukkan ukuran kualitas dari sistem pengendalian intern pada suatu organisasi. Satuan ukurnya adalah level maturitas. Indikator ini adalah untuk melihat kematangan

Penyelenggaraan SPIP Kota Tebing Tinggi.

➤ Realisasi Tahun 2022

Target yang ditetapkan pada Tahun 2022 adalah Level 3. Penetapan Level ini ditentukan berdasarkan penilaian intern yang dilakukan Inspektorat Kota Tebing Tinggi dan Penilaian akhir yang dilakukan BPKP. Sampai dengan laporan ini dibuat, BPKP belum mengeluarkan penilaian akhir terhadap SPIP di Kota Tebing Tinggi. Akan tetapi walaupun demikian, sesuai dengan penilaian Internal yang dilakukan Inspektorat Kota Tebing Tinggi maka SPIP di Kota Tebing Tinggi sudah berada pada level 3. Dengan demikian capaiannya meningkat sebesar 100% dengan penjelasan sebagai berikut:

Target Tahun 2022: Level 3 = 100%

Jika Level 1 = 50%

Jika Level 2 = 75%

Jika Level 3 = 100%

Jika Level 4 = 150%

Jika Level 5 = 200%

➤ Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya

Walaupun penilaian maturitas SPIP belum dikeluarkan oleh BPKP pada awal tahun ini namun, level maturitas SPIP Pemerintah Kota Tebing Tinggi masih berada pada level 3 (terdefenisi) dengan skor SPIP (menurut penilaian BPKP Pusat) adalah sebesar **3**.

➤ Perbandingan Realisasi dengan Target pada Akhir Renstra

Pada Akhir Renstra Inspektorat Kota Tebing Tinggi menurut suplemen renstra inspektorat kota tebing tinggi tahun 2021 menargetkan Level Maturitas SPIP berada pada Level 3 yang artinya bahwa indikator kinerja ini sudah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

➤ Analisis Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan tercapainya target tahun ini adalah hasil dari kerja keras tim dan kerja sama dengan SKPD dan bimbingan dari BPKP.

Adapun upaya yang dilakukan untuk dapat meningkatkan Level Maturitas SPIP ini antara lain:

- Membentuk satgas SPIP pada setiap Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi
- Mensosialisasikan SPIP pada setiap Organisasi Perangkat Daerah di Kota

Tebing Tinggi dengan Inspektorat Kota sebagai koordinatonya;

- Evaluasi penerapan SPIP pada setiap Organisasi Perangkat Daerah;
- Melakukan Monitoring pada penerapan dan pelaksanaan SPIP pada Organisasi Perangkat Daerah;

b. Persentase SKPD dengan Nilai AKIP Minimal B

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Peran SAKIP diharapkan dapat mendukung terciptanya *Good Governance*. Indikator ini menargetkan SKPD memiliki nilai AKIP minimal B pada evaluasi SAKIP yang dilaksanakan melalui evaluasi internal (Inspektorat) tahun 2022. Tahun 2022 artinya, Perangkat Daerah setidaknya telah mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat dari seluruh penggunaan anggaran daerah secara efektif, efisien dan ekonomis.

➤ Realisasi Tahun 2022

Target yang ditetapkan pada Tahun 2022 adalah sebesar 80% yang merupakan penilaian LAKIP SKPD pada Tahun 2022 dan perencanaan pada Tahun 2022. Dari 32 SKPD yang dievaluasi AKIP-nya. Realisasi pada Tahun 2022 adalah Hasil Evaluasi 26 SKPD sebesar 100% (32 SKPD) Data ini didapat dari Hasil Evaluasi pada setiap SKPD yang ada dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.9
Penilaian LAKIP SKPD Tahun 2022

NO	NAMA OBRIK	HASIL EVALUASI
1	Sekretariat Daerah	BB
2	Sekertariat DPRD	BB
3	Inspektorat Kota	BB
4	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	BB
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	A
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	BB
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	BB
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BB
9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	A

10	Dinas Kesehatan	BB
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	BB
12	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	BB
13	Satuan Polisi Pamong Praja	BB
14	Dinas Sosial	BB
15	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian	BB
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	BB
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	BB
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	A
19	Dinas Lingkungan Hidup	BB
20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	BB
21	Dinas Perhubungan	A
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	BB
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	BB
24	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	BB
25	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	BB
26	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	BB
27	Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan	BB
28	Kecamatan Bajenis	BB
29	Kecamatan Padang Hilir	BB
30	Kecamatan Padang Hulu	BB
31	Kecamatan Tebing Tinggi Kota	B
32	Kecamatan Rambutan	B

- Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya
realisasi tahun ini dari 32 SKPD terdapat 4 SKPD dengan nilai A, 26 SKPD dengan nilai BB dan 2 SKPD dengan nilai B, sedangkan bila dibandingkan dengan hasil penilaian Tahun 2021 nilai AKIP SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi mengalami peningkatan.
- Perbandingan Realisasi dengan Target pada Akhir Renstra
Pada Akhir Renstra Inspektorat Kota Tebing Tinggi menargetkan Persentase SKPD dengan nilai AKIP B sebesar 80%. Dengan adanya komitmen dari Kepala Daerah, dan disertai dengan adanya bimbingan teknis atau Diklat untuk evaluator, maka untuk indikator kinerja ini sudah

tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

- Analisis Keberhasilan/Kegagalan
Adapun upaya yang dilakukan untuk dapat meningkatkan realisasi kinerja ini antara lain:
 - Peranan dan Komitmen dari Kepala Daerah dan Kepala SKPD sangat penting untuk keberhasilan indikator ini;
 - Tim Evaluator Inspektorat Kota Tebing Tinggi bukan hanya sebagai penilai tetapi juga membimbing, memberi saran perbaikan untuk Akuntabilitas Kinerja yang baik;
 - Meningkatkan Sumber Daya Aparatur melalui Diklat Evaluator;
 - Menjalin Kerja sama yang baik dengan Tim.
 - perencanaan (Bappeda) dan Tim pelaporan (Bagian Organisasi) sehingga hasil perbaikan dapat diteruskan.

c. Level Kapabilitas APIP

Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan penilaian terhadap kemampuan Inspektorat Kota Tebing Tinggi dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan.

- Realisasi Tahun 2022
Outcome dari kegiatan ini adalah Peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Tebing Tinggi menjadi level 3. Pada Tahun 2022, Inspektorat Kota Tebing Tinggi masih mendapatkan Penilaian Kapabilitas pada posisi Level 3. Diharapkan pencapaian ini pada tahun berikutnya dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.
- Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya.
Pada Tahun sebelumnya, untuk indikator kinerja Level Kapabilitas APIP sama dengan tahun ini.
- Perbandingan Realisasi dengan Target pada Akhir Renstra Pada Akhir Renstra Inspektorat Kota Tebing Tinggi menargetkan level 3. Dengan adanya komitmen dari Kepala Daerah, dan disertai dengan adanya bimbingan teknis atau Diklat untuk evaluator, maka niscaya target tersebut dapat tercapai.
- Analisis Keberhasilan/Kegagalan
Keberhasilan tercapainya target tahun ini adalah :
 - Komitmen pimpinan yang tinggi dalam meningkatkan kapabilitas APIP;
 - Menindaklanjuti setiap saran dari BPKP;
 - Kerjasama yang baik dari aparatur, pengawasan terutama dari

dokumentasi hasil pengawasan.

3.1.1.4 Analisis Kegiatan Penunjang:

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran dan indikator Level Maturitas SPIP pada Inspektorat Tebing adalah sebagai berikut :

- Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah pada Kegiatan Evaluasi SPIP. Pada kegiatan ini dilakukan telaah pada setiap unsur terkait dengan penilaian Maturitas SPIP sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008. Mulai dari tahapan persiapan yaitu pembentukan satgas dan tim, lalu pelaksanaan yang ditandai dengan pengisian kuesioner, validasi dan pengujian bukti maturitas dan pelaporan dengan pemberian skor maturitas.
- Kegiatan lainnya yang mendukung keberhasilan Level Maturitas SPIP adalah Pengawasan Internal secara berkala. Kegiatan ini adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan).
- Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah pada Kegiatan Reviu LAKIP dan Kegiatan Evaluasi SAKIP. Pada kegiatan ini dilakukan penilaian terhadap SAKIP mulai dari Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi pada SKPD se-Kota Tebing Tinggi dan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
- Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran dan indikator ini adalah kapabilitas APIP.

3.1.1.5 Faktor Umum Keberhasilan Karena Perubahan Strategi Akibat COVID-19

1. Untuk mencapai target indikator kinerja “Persentase temuan yang ditindaklanjuti” maka Inspektorat Kota Tebing Tinggi melakukan monitoring TLHP melalui telepon, whatsapp, zoom, dan prosedur lainnya.
2. Menyesuaikan indikator kinerja, apabila kegiatan yang mendukungnya direfocussing
3. Melaksanakan pengawasan dengan mematuhi protokol kesehatan
4. Menyediakan wastafel, masker, thermal gun dan hand sanitizer
5. Melakukan rapat dengan memanfaatkan zoom meeting
6. Apabila harus rapat dengan tatap muka, maka tetap mematuhi protokol kesehatan (jarak kursi 1-2 meter, memakai masker, handsanitizer, dll)
7. Data-data pengawasan dikirim melalui media elektronik.

3.2 Realisasi Anggaran

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi serta dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pada Inspektorat Kota Tebing Tinggi, dana yang dialokasikan melalui APBD TA 2022 berjumlah sebesar Rp 1.763.105.500 dengan Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun 2022, rincian dapat dilihat pada tabel 3.10 berikut :

Tabel 3.10
Program/Kegiatan Terhadap Realisasi Inspektorat Kota Tebing Tinggi
Tahun 2022

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN %
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.624.773.500	1.399.272.400	86,12 %
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.229.012.000	969.773.400	78,90 %
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	180.000.000	159.400.000	88,55 %
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	510.000.000	386.225.000	75,73 %
	Reviu Laporan Kinerja	72.000.000	70.300.000	97,63 %
	Reviu Laporan Keuangan	180.000.000	161.700.000	89,83 %
	Kerjasama Pengawasan Internal	121.240.000	90.735.000	74,83 %
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	165.772.000	101.413.400	61,17 %
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	574.509.700	429.499.000	74,75 %
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	214.509.700	82.224.000	38,33 %
2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	138.332.000	52.447.000	37,91 %
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	12.628.000	10.945.000	86,67 %
	Perumusan Kebijakan Teknis di	12.628.000	10.945.000	86,67 %

Bidang Fasilitas Pengawasan			
Pendampingan dan Asistensi	125.704.000	41.502.000	33,01 %
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	55.180.000	14.414.000	26,12 %
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	48.000.000	18.900.000	39,37 %
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	22.524.000	8.188.000	36,35 %
TOTAL	1.941.853.700	1.451.719.400	74,75 %

Tabel 3.10 menjelaskan bahwa capaian realisasi atas Laporan Kinerja Tahunan Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2022 menunjukkan penilaian atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan IKU Inspektorat Kota Tebing Tinggi 2017–2022, sebagaimana juga yang terdapat didalam dokumen Suplemen Renstra Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun 2021-2022.

3.3 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat efisiensi terhadap capaian realisasi Anggaran dan Indikator Kinerja berdasarkan tujuan/sasaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.11
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran Terhadap Tingkat Efisiensi Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun 2022

NO	TUJUAN/ SASARAN	Indikator Kinerja	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			% TARGET	% REALI SASI	% CAPAIAN	ANGGA RAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN	
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih	1. Persentase tindak lanjut temuan	96,65	98,57	101,99	1.452.80 5.700	1.087.025.400	74,82	26,64
		2. Persentase temuan yang bebas dari penyimpangan keuangan dan aset material							
		3. Persentase penyelesaian kasus pengaduan							
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel	1. Level Maturitas SPIP	85,7	96,5	112,6	489.048. 000	364.694.000	74,57	33,77
		2. Persentase SKPD dengan nilai AKIP minimal B							
		3. Level Kapabilitas APIP							

Tabel 3.11 menjelaskan bahwa dari capaian realisasi atas Laporan Kinerja Tahunan Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2022 menunjukkan tingkat efisiensi penilaian atas pelaksanaan kegiatan Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun 2022.

Sedangkan terhadap capaian realisasi anggaran dan indikator kinerja berdasarkan program/kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.12
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan
Pada Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun 2022

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	97 %	106 %	109,27 %	1.624.773.500	1.399.272.400	86,12 %	21,19
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	97 Laporan	97 Laporan	100 %	1.229.012.000	969.773.400	78,90 %	21,09
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	10 Laporan	10 Laporan	100 %	180.000.000	159.400.000	88,55 %	11,44
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	29 Laporan	29 Laporan	100 %	510.000.000	386.225.000	75,73 %	24,27
	Reviu Laporan Kinerja	32 Laporan	32 Laporan	100 %	72.000.000	70.300.000	97,63 %	2,36
	Reviu Laporan Keuangan	15 Laporan	15 Laporan	100 %	180.000.000	161.700.000	89,83 %	10,17
	Kerjasama Pengawasan Internal	7 Laporan	7 Laporan	100 %	121.240.000	90.735.000	74,83 %	25,16
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Laporan	4 Laporan	100 %	165.772.000	101.413.400	61,17 %	38,82
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	43 Laporan	49 Laporan	113 %	574.509.700	429.499.000	74,75 %	34,39
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	3 Laporan	3 Laporan	100 %	214.509.700	82.224.000	38,33 %	61,67
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	40 Laporan	46 Laporan	115 %	360.000.000	347.275.000	96,46 %	16,12
2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	97 %	100 %	103,09 %	138.332.000	52.447.000	37,91 %	63,32
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	12.628.000	10.945.000	86,67 %	13,33
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	12.628.000	10.945.000	86,67 %	13,33
	Pendampingan dan Asistensi	5 Laporan	5 Laporan	100 %	125.704.000	41.502.000	33,01 %	66,98

Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan	2 Laporan	100 %	55.180.000	14.414.000	26,12 %	73,88
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	2 Laporan	2 Laporan	100 %	48.000.000	18.900.000	39,37 %	60,63
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 Laporan	1 Laporan	100 %	22.524.000	8.188.000	36,35 %	63,65

Tabel 3.12 menunjukkan dari capaian realisasi atas Laporan Kinerja Tahunan Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2022 menunjukkan pencapaian atas pelaksanaan program/kegiatan Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun 2022.

3.4 Inovasi

Program inovasi dilakukan dalam rangka memberikan dampak positif jangka pendek yang dapat dirasakan oleh publik/ masyarakat sebagai outcome dari langkah-langkah reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Adapun program inovasi yang menjadi langkah-langkah reformasi birokrasi dalam rangka mempermudah penyelenggaraan tugas fungsi Inspektorat Kota Tebing Tinggi yaitu:

1. Layanan Konsultasi Inspektorat

Salah satu tugas Inspektorat Kota Tebing Tinggi adalah pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan. Tujuan dari layanan ini adalah agar penyelenggara negara bahkan masyarakat dapat bertanya dan berkonsultasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Layanan konsultasi ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran baik administrasi maupun pidana terhadap setiap penyelenggaraan pemerintahan.

2. Layanan Jemput Bola Gratifikasi

Pejabat Negara dapat dikatakan rentan terhadap praktek gratifikasi. Untuk itu, Inspektorat Kota Tebing Tinggi melakukan jemput bola apabila ada pejabat yang ingin melaporkan gratifikasi termasuk dengan aktif dalam perayaan masyarakat seperti pesta pernikahan dan sebagainya.

3. Penyusunan Fokus Pengawasan Berbasis Risiko

Semakin bertambahnya tugas dan tanggung jawab APIP dan minimnya Aparatur Pengawas yang ada, maka perlu dilakukan pengawasan yang terfokus dengan berdasarkan basis risiko. Untuk itu, Inspektorat Kota Tebing Tinggi perlu merumuskan pengawasan yang dilakukan secara berkala dengan memfokuskan pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan yang berisi.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah kewajiban bagi setiap Kepala Unit Kerja Eselon II ke atas, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Inspektorat Kota Tebing Tinggi adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM dan Sumber dana serta sarana dan prasarana secara efektif dan efisien.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut diatas, maka kinerja Inspektorat Kota Tebing Tinggi selama tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1 Untuk tujuan/sasaran strategis Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih terdiri atas 3 (tiga) indikator kinerja utama yang terdiri atas : Persentase temuan yang ditindak lanjuti, Persentase temuan yang bebas dari penyimpangan keuangan dan asset material, dan Persentase penyelesaian kasus pengaduan. Ketiga indikator utama tersebut pada Tahun 2022 terealisasi sesuai dengan target akhir renstra dengan realisasi gabungan sebesar 98,57% dan tingkat efisiensi sebesar 26,64.
- 2 Untuk tujuan/sasaran strategis Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel terdiri atas 3 (tiga) indikator kinerja utama yang terdiri atas : Level Maturitas SPIP, Persentase SKPD dengan nilai AKIP minimal B, dan Level Kapabilitas APIP. Ketiga indikator utama tersebut pada Tahun 2022 terealisasi sesuai dengan target akhir renstra dengan realisasi gabungan sebesar 96,5% dan tingkat efisiensi sebesar 19,35.

B. Rekomendasi

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Inspektorat Kota Tebing Tinggi dimasa mendatang antara lain:

1. Meningkatkan keahlian dan ketrampilan SDM APIP dalam rangka menjalankan fungsi APIP sebagai *quality assurance* dan *consulting partner*.
2. Meningkatkan kinerja APIP sebagai *early warning system*;
3. Meningkatkan pelaksanaan Monev atas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) APIP.

Demikian Laporan Kinerja Inspeksi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 disusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Tebing Tinggi, 31 Januari 2023

INSPEKTUR KOTA TEBING TINGGI



H. KAMLAN, S.H., M.M., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19650603 198602 1 004



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
INSPEKTORAT KOTA

Jl. Gunung Agung No. 4 Telp./Fax (0621) 21757 Kota Tebing Tinggi

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. KAMLAN, S.H., M.M., CGCAE

Jabatan : INSPEKTUR

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Muhammad Dimiyathi, S.Sos, M.TP

Jabatan : PJ. WALI KOTA TEBING TINGGI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tebing Tinggi, 29 November 2022

Pihak Kedua,



Muhammad Dimiyathi, S.Sos, M.TP

Pihak Pertama,



H. KAMLAN, S.H., M.M., CGCAE

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
INSPEKTORAT KOTA
KOTA TEBING TINGGI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH	PERSENTASE TEMUAN YANG DITINDAKLANJUTI	94 (Persen)
		PERSENTASE TEMUAN YANG BEBAS DARI PENYIMPANGAN KEUANGAN DAN ASET MATERIAL	98 (Persen)
		PERSENTASE PENYELESAIAN KASUS PENGADUAN	98 (Persen)
2.	MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL	LEVEL MATURITAS SPIP	3 (Angka)
		PERSENTASE OPD DENGAN NILAI AKIP MINIMAL B	80 (Persen)
		LEVEL KAPABILITAS APIP	3 (Angka)

No.	Program	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 6,932,269,500
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rp. 1,803,521,700
3.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rp. 138,332,000
TOTAL		Rp. 8,874,123,200

Pihak Kedua,

Muhammad Dimiyath, S.Sos, M.TP

Pihak Pertama,

H. KAMLAN, S.H., M.M., CGCAE